Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page 12464-12475

Peran Pemerintah Daerah Dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Asahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak Tahun 2024

Najla Rihadatul Aisy, Muntasir, Naidi Faisal, M. Rizwan, Mulyadi
Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia
Corresponding Author: Najla Rihadatul Aisy, E-Mail: najla.210220052@mhs.unimal.ac.id

Published: September, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Asahan dalam mendorong partisipasi masyarakat pada Pemilu Serentak 2024. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya angka partisipasi pemilih di Kabupaten Asahan yang mencapai 74% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 556.475 orang. Meski demikian, kenaikan partisipasi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan transparansi data pemilu pada situs resmi KPU Asahan, akses informasi yang belum merata, serta kepercayaan publik yang belum sepenuhnya terbangun kembali.Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pihak KPU Asahan, Kesbangpol, tokoh masyarakat, serta pemilih. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa KPU Asahan berperan aktif dalam melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat dengan memanfaatkan berbagai media dan pendekatan partisipatif. Sementara itu, Kesbangpol berfungsi sebagai mitra strategis yang memperkuat pendidikan politik berbasis komunitas sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Adapun hambatan utama partisipasi pemilih antara lain keterbatasan akses terhadap informasi pemilu yang terpercaya, rendahnya literasi politik, serta kurang transparannya kanal digital resmi KPU. Di sisi lain, kerja sama antara KPU dan Kesbangpol menjadi faktor pendukung penting dalam mengedukasi pemilih serta membangun kesadaran politik, khususnya melalui pendekatan komunikasi politik yang adaptif dan berbasis lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan peningkatan partisipasi pemilih tidak hanya diukur secara kuantitatif, tetapi juga ditentukan oleh kualitas strategi komunikasi serta keterbukaan informasi yang disediakan oleh lembaga terkait.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilu 2024, KPU Asahan, Kesbangpol, transparansi informasi, komunikasi politik, Kabupaten Asahan

ABSTRACT

This study aims to examine the role of the Regional Government through the National Unity and Political Agency (Kesbangpol) and the General Election Commission (KPU) of Asahan Regency in encouraging public participation in the 2024 Simultaneous Elections. The background of this research is based on the increasing voter turnout in Asahan Regency, which reached 74% of the total Permanent Voter List (DPT) of 556,475 people. However, this increase still faces several challenges, such as limited transparency of election data on the official website of KPU Asahan, unequal access to information, and a public trust that has not been fully restored.This study employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, field observations, and documentation. The research informants consist of KPU Asahan, Kesbangpol, community leaders, and voters. The findings reveal that KPU Asahan plays an active role in conducting political socialization using various media and participatory approaches. Meanwhile, Kesbangpol functions as a strategic partner by strengthening community-based political education and serving as a bridge between the government and society.The main obstacles to voter participation include limited access to credible election information, low political literacy, and the lack of transparency on KPU's official digital platforms. On the other hand, the collaboration between KPU and Kesbangpol has become an important supporting factor in educating voters and fostering political awareness, particularly through adaptive and locally based political communication approaches. This study concludes that the success of increasing voter participation is not only measured quantitatively but also determined by the quality of communication strategies and the transparency of information provided by related institutions.

Keywords: Political Participation, 2024 Elections, KPU Asahan, Kesbangpol, information transparency, political communication, Asahan Regency.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Fokus kajian demokrasi di Indonesia selama ini lebih banyak menekankan pada aspek prosedural, seperti penyelenggaraan pemilu dan penghitungan suara, sementara aspek substantif seperti transparansi informasi dan literasi politik masyarakat sering kali terabaikan. Padahal, pemilu yang ideal bukan hanya menghasilkan legitimasi politik melalui angka partisipasi, tetapi juga menciptakan kepercayaan publik yang kokoh melalui keterbukaan informasi dan komunikasi politik yang sehat (Zulkarnain et al., 2023). Kondisi ini memperlihatkan bahwa partisipasi politik masyarakat perlu dilihat dari sisi kuantitas dan kualitas.

KPU dan Kesbangpol sejatinya memiliki potensi strategis dalam meningkatkan partisipasi politik. KPU sebagai penyelenggara pemilu berfungsi memastikan transparansi dan akuntabilitas, sementara Kesbangpol berperan dalam memperkuat pendidikan politik masyarakat. Penelitian Ummanah & Pramono (2025) menekankan pentingnya komunikasi politik yang adaptif untuk membangun legitimasi, sedangkan studi Bahri et al., (2023) menunjukkan bahwa pendidikan politik berbasis komunitas dapat memperkuat modal sosial dan partisipasi politik warga. Artinya, kolaborasi kedua lembaga ini berpeluang besar menjadi instrumen penguatan demokrasi di tingkat lokal.

Meski demikian, transparansi data pemilu di Kabupaten Asahan masih menghadapi hambatan serius. Situs resmi KPU Kabupaten Asahan sering kali tidak menampilkan informasi substansial terkait DPT, perolehan suara, maupun hasil rekapitulasi per TPS. Fenomena ini juga terjadi pada Pemilu 2019 dan berlanjut hingga Pemilu Serentak 2024 (KPU SUMUT, 2024). Informasi yang seharusnya tersedia secara publik justru banyak diperoleh melalui media massa, yang sering kali tidak menyajikan data secara komprehensif (Antara News, 2019). Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penyelenggara pemilu.

Minimnya transparansi informasi menjadi salah satu faktor penghambat keterlibatan publik secara optimal. Data partisipasi pemilih di Sumatera Utara menunjukkan adanya disparitas, termasuk rendahnya tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas yang hanya mencapai 56,85%, jauh di bawah rata-rata partisipasi umum (KPU, 2024). Di Kabupaten Asahan sendiri, meski partisipasi mencapai 74% dari total 556.475 DPT, angka golput masih mencapai 26% atau sekitar 144.689 orang (kumparanNEWS, 2024). Fakta ini menandakan masih adanya hambatan struktural, seperti literasi politik rendah dan keterbatasan akses informasi kredibel.

Penelitian terdahulu sebagian besar menyoroti peran KPU dalam sosialisasi pemilu, tetapi belum banyak yang mengkaji secara mendalam bagaimana kolaborasi KPU dan Kesbangpol dapat mengatasi persoalan literasi politik dan keterbukaan informasi di tingkat lokal. Misalnya, Malik et al., (2020)

menekankan pentingnya transparansi dalam memperkuat legitimasi politik, namun fokusnya lebih pada kinerja institusi tunggal. Dengan demikian, kajian yang menyoroti sinergi dua lembaga sekaligus dalam konteks peningkatan partisipasi masyarakat di pemilu masih jarang ditemukan.

Keterbaruan penelitian ini terletak pada upaya memperluas perspektif dengan melihat peran strategis Kesbangpol sebagai mitra KPU dalam membangun kesadaran politik. Jika sebagian besar literatur menekankan peran KPU secara independen, penelitian ini menghadirkan pendekatan berbeda dengan mengkaji bagaimana sinergi kelembagaan dapat memperkuat kualitas demokrasi di daerah. Melalui sosialisasi politik berbasis komunitas, Kesbangpol dapat menjadi garda terdepan dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus mengatasi apatisme politik yang muncul akibat kurangnya transparansi informasi.

Urgensi penelitian ini semakin jelas mengingat masih tingginya angka golput dan rendahnya kualitas transparansi pemilu di Kabupaten Asahan. Sementara beberapa studi terdahulu telah menekankan pentingnya literasi politik dan komunikasi publik dalam meningkatkan partisipasi (Juliasih, 2019; Sorik, 2019), kajian empiris mengenai kolaborasi KPU dan Kesbangpol masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis strategi komunikasi, hambatan transparansi, serta efektivitas peran kedua lembaga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Tujuan akhirnya adalah merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif dan adaptif guna memperkuat partisipasi politik berbasis lokal pada Pemilu Serentak 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Lokasi ini dipilih karena Kabupaten Asahan merupakan salah satu daerah yang mengalami peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak 2024 hingga mencapai 74% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 556.475 orang. Namun, peningkatan ini masih dibarengi dengan sejumlah persoalan, seperti keterbatasan transparansi data pemilu pada laman resmi KPU, hambatan akses informasi, serta kepercayaan publik yang belum sepenuhnya pulih. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Asahan relevan untuk diteliti dalam konteks peran KPU dan Kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus mengatasi persoalan transparansi dan komunikasi politik di tingkat lokal.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana peran KPU dan Kesbangpol berkolaborasi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara kontekstual dan detail, sehingga dapat menangkap dinamika, proses, dan strategi komunikasi yang dijalankan oleh kedua lembaga tersebut (Murdiyanto, 2020).

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu mereka yang dianggap mengetahui secara langsung permasalahan partisipasi politik dan keterbukaan informasi pemilu. Informan terdiri atas pejabat Kesbangpol, komisioner KPU Asahan, tokoh masyarakat, dan pemilih. Pemilihan informan ini didasarkan pada peran strategis mereka dalam penyelenggaraan pemilu dan keterlibatannya dalam program sosialisasi serta pendidikan politik masyarakat (Muzaffarsyah et al., 2021).

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Kriteria Informan	Jenis Kelamin	Kode Informan	Jumlah
1	Kepala Kesbangpol dan pejabat terkait	Lk.	KB	3
2	Komisioner KPU Asahan	Lk./Pr.	KP	3
3	Tokoh Masyarakat	Lk.	TM	1
4	Pemilih (masyarakat umum)	Lk./Pr.	PM	5
Total				**12**

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan utama untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai peran dan strategi kelembagaan, observasi partisipatif terhadap kegiatan sosialisasi politik yang dilakukan KPU dan Kesbangpol, serta dokumentasi berupa arsip resmi, laporan, berita, maupun dokumen kebijakan yang relevan. Data wawancara juga didukung dengan catatan observasi dan dokumentasi untuk menjaga keakuratan dan memperkuat temuan penelitian (Fadli, 2021).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Model ini dipilih karena memberikan ruang analisis yang sistematis dan berulang, sehingga memudahkan peneliti menemukan pola, tema, dan hubungan antar data. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan triangulasi sumber, metode, dan pengamat. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta melibatkan lebih dari satu pengamat untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian (Rijali, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kesbangpol dalam Edukasi Politik Warga

Kesbangpol Asahan berperan strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendidikan politik, wawasan kebangsaan, serta kemitraan lintas sektor. Meski tidak memiliki wewenang teknis, Kesbangpol menekankan peran politiko-kultural dalam membentuk kesadaran warga.

"*Kalau soal teknis pemilu, itu KPU. Tapi kita berperan dari sisi peningkatan partisipasi masyarakat. Kita jalankan edukasi politik, juga penguatan wawasan kebangsaan*." (Wawancara dengan Ahmad Nizar, 2024)

Namun, keterbatasan akses terhadap data resmi membuat peran edukasi politik ini kurang optimal. Hal ini sejalan dengan Fahruroji & Tuti (2020) yang menekankan akses informasi sebagai prasyarat perilaku pemilih aktif. Rahman Halim menambahkan bahwa program pendidikan politik umumnya dilakukan lewat tatap muka dan forum kemitraan dengan ormas serta perguruan tinggi, meski evaluasi belum berbasis indikator terukur.

"*Kami melaksanakan pendidikan politik lewat tatap muka… Kita libatkan juga ormas dan perguruan tinggi dalam kegiatan Gerakan Kemitraan.*" (Wawancara dengan Rahman Halim, 2024)

Temuan ini konsisten dengan penelitian Putra, (2020) yang menyebut banyak kegiatan sosialisasi politik di daerah hanya berfokus pada output administratif (jumlah kegiatan, peserta) bukan outcome berupa pemahaman warga. Bahkan, keterlibatan partai politik cenderung elitis karena terbatas pada kalangan internal (Sarofah, 2023).

Minimnya laporan kinerja terbaru juga menjadi hambatan serius dalam mengukur dampak program. Seperti dikonfirmasi Ahmad Nizar, Laporan Kinerja 2023 masih dalam proses penyusunan, sehingga transparansi dan akuntabilitas belum terjaga. Padahal menurut Gofur et al., (2023), pendidikan politik seharusnya mengarah pada pembentukan civic virtue, yaitu kesadaran warga untuk aktif berpartisipasi demi kepentingan republik.

Dengan demikian, meski Kesbangpol Asahan telah menjalankan fungsi edukasi politik, keterbatasan akses data, ketiadaan evaluasi terukur, dan minimnya dokumentasi membuat perannya belum maksimal dalam membangun kesadaran politik yang substantif.

Dinamika Partisipasi, Akses Informasi, dan Penilaian Publik

Partisipasi politik masyarakat Asahan pada Pemilu Serentak 2024 menunjukkan keragaman motivasi dan hambatan. Sebagian warga memilih abstain karena tidak percaya pada kandidat atau menganggap pemilu tidak membawa perubahan. Seperti diungkapkan Irwansyah Daulay: *"Saya nggak milih karena nggak ada yang cocok. Sama aja semua. Nggak percaya juga, kalau udah jadi, ya lupa sama rakyat"* . Hal ini mencerminkan apatisme politik yang sesuai dengan konsep *rational disengagement* (Santer et al., 2005), yaitu pilihan sadar untuk tidak berpartisipasi karena ketiadaan figur yang layak dipercaya. Senada, seorang ibu rumah tangga menyatakan pemilu tidak berdampak langsung pada kehidupannya: *"Yang saya rasakan sih, pilih atau nggak pilih itu nggak ngaruh. Harga tetap mahal, hidup susah juga. Jadi buat apa nyoblos?"* . Orientasi praktikal semacam ini memperkuat teori *instrumental participation* bahwa partisipasi sering dinilai dari manfaat ekonomi jangka pendek, bukan nilai demokratis.

Namun, terdapat pula warga yang tetap memilih meski tanpa sosialisasi resmi. Rudi Zulfani menegaskan: *"Nggak ada ikut sosialisasi, nggak pernah juga lihat ajakan milih dari KPU. Tapi tetap saya pilih, karena itu hak saya"* . Sikap ini menunjukkan adanya *political efficacy* atau keyakinan intrinsik bahwa suara individu memiliki makna dalam sistem politik (Verba et al., 1978). Dari perspektif tokoh masyarakat, Mapilindo menilai partisipasi memang meningkat, namun motivasi warga masih banyak dipengaruhi

faktor sosial: *"Masih banyak yang datang karena ajakan tokoh lokal atau ikut-ikutan. Edukasi politik masih jadi PR besar"* (Wawancara, 2024). Hal ini sejalan dengan temuan Malik et al., (2020) bahwa ajakan komunitas sering lebih menentukan ketimbang pendidikan politik formal.

Sumber informasi yang diakses warga pun beragam. Sebagian besar masih mengandalkan jaringan informal seperti grup WhatsApp, masjid, atau tokoh masyarakat. Irwansyah Daulay menyebut: *"Saya tahu soal pemilu dari grup WA sama tetangga. Kadang ada juga yang ngasih tau dari masjid"* . Pola ini sesuai dengan teori *two-step flow of communication* (Ma'mun, 2023), di mana pesan lebih dipercaya bila disampaikan oleh figur yang dekat. Sementara itu, kehadiran petugas lapangan terbukti efektif sebagai *information bridge*, sebagaimana dialami M. Akbar Febrianto: *"Saya tahu jadwal nyoblos ya dari petugas waktu coklit, dia datang ke rumah dan sekalian ngasih info juga"*. Sebaliknya, media digital justru kerap menimbulkan kebingungan. Seorang warga mengaku: *"Saya kadang lihat Facebook, tapi malah bingung. Banyak info beda-beda. Akhirnya saya percaya sama ibu-ibu pengajian"*. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital yang rendah membuat konten resmi KPU di media sosial belum menjangkau merata.

Penilaian warga terhadap peran KPU dan Kesbangpol pun bervariasi. Hernita Rumapea mengalami kebingungan administratif karena tidak mendapat informasi teknis yang jelas: *"Undangan saya bawa, tapi katanya harus bawa KTP juga. Saya pikir kalau udah ada undangan ya cukup"*. Kasus ini mencerminkan lemahnya fungsi *stimulating agent* lembaga demokrasi (Verba et al., 1978). Sementara itu, Irwansyah Daulay menyatakan ketidakpercayaannya: *"KPU dan orang-orang pemerintah itu ya gitu aja. Datang sekali pas pemilu, habis itu nggak kelihatan. Saya nggak percaya"* , yang sejalan dengan teori *public trust* bahwa kepercayaan dibangun dari konsistensi kehadiran, bukan seremonial (Muzaffarsyah et al., 2021). Sebaliknya, pemilih muda seperti M. Akbar Febrianto merasa terbantu dengan konten digital KPU: *"Saya tahu kapan milih dari petugas dan juga sempat lihat video pendek KPU di Instagram. Jadi menurut saya cukup jelas"*.

Transparansi Informasi dan Kendala Pelaporan Pemilu

Keterbukaan informasi menjadi isu penting dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Asahan. Minimnya data pada kanal resmi KPU daerah menimbulkan kesan bahwa transparansi belum sepenuhnya dijalankan. Kristian Santo Yosefh Sinulingga, Kepala Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Asahan menegaskan: *"Keterbatasan akses data pemilu di situs resmi KPU Kabupaten Asahan disebabkan oleh sistem pengelolaan data yang terpusat di KPU RI. Semua data pemilu terintegrasi melalui SIREKAP dan SIDALIH yang dikelola langsung oleh pusat"*. Hal senada juga disampaikan Ketua KPU Asahan, Hidayat: *"Kami di daerah tidak bisa mengunggah langsung data pemilu seperti DPT atau hasil rekap. Website kabupaten lebih bersifat informatif dan umum saja. Semua data pemilu terbitnya tetap dari pusat"*. Keterangan ini menunjukkan adanya kendala struktural karena KPU daerah tidak memiliki kewenangan teknis dalam mengelola situs web secara mandiri.

Situasi tersebut berimplikasi pada lemahnya fungsi website resmi sebagai simbol legitimasi lembaga publik. Tokoh masyarakat Mapilindo menyoroti persoalan ini: *"Kalau websitenya kosong atau tidak aktif, itu*

justru bikin orang curiga, padahal mungkin bukan salah mereka" . Menurut teori e-governance Jan van Dijk, transparansi hanya dapat terwujud jika sistem informasi memenuhi prinsip *openness, interoperability,* dan *responsiveness*. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa KPU Asahan belum memenuhi prinsip ini karena sistem masih sepenuhnya tersentralisasi di pusat.

Sebagai alternatif, KPU Asahan mengalihkan fokus ke media sosial. M. Syah, Kepala Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, menjelaskan: *"Peran media sosial sangat signifikan dalam strategi pendidikan pemilih di Asahan. Kami membentuk tim khusus untuk memproduksi konten informatif, menarik, dan relevan, mulai dari reels, story, infografis, hingga live streaming..."*. Meskipun efektif dalam menjangkau warga secara cepat, sifat media sosial yang temporer membuat informasi mudah tenggelam dan sulit diaudit. Mapilindo mengingatkan: *"Informasi itu bukan cuma soal ajakan, tapi juga data. Kalau media sosial hanya untuk promosi, ya masyarakat tetap nggak bisa cek angka-angka penting"* . Dengan demikian, penggunaan kanal informal tanpa dukungan arsip formal justru menimbulkan kerentanan baru terhadap multitafsir informasi.

Kendala juga terjadi pada pelaporan data pemilu. Kristian kembali menegaskan bahwa *"Seluruh laporan data pemilu langsung dikelola melalui sistem SIREKAP dan SIDALIH, bukan sistem internal di tingkat kabupaten. Jadi, secara teknis, kabupaten tidak punya otoritas langsung dalam mengatur distribusi datanya"*. Sentralisasi sistem pelaporan ini menyulitkan respons cepat jika terjadi gangguan teknis. Ahmad Nizar, Kepala Kesbangpol Asahan, menambahkan: *"Data-data itu semua berada di KPU. Kami di Kesbangpol tidak ikut dalam sistem pelaporan. Yang kami lakukan hanya mendorong partisipasi dan membantu menyebarluaskan informasi"*. Pernyataan ini menunjukkan tidak adanya pelaporan kolaboratif antara KPU dan Kesbangpol, sehingga koordinasi data politik lokal menjadi lemah.

Penelitian sebelumnya juga mendukung temuan ini. Halilah (2022) mencatat bahwa pelaporan pemilu di Sulawesi Selatan menurun kualitasnya karena tidak didukung sistem lokal dan minim pelibatan lintas sektor. Putri (2016) menemukan bahwa pelaporan hasil pemilu di Jambi kehilangan validitas jika hanya bertumpu pada sistem pusat tanpa akuntabilitas lokal. Bahkan Faisal et al., (2024) menyoroti ketidaksinkronan regulasi pusat-daerah yang kerap memperlambat pelaporan dan memicu kebingungan kelembagaan.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa transparansi informasi pemilu di Asahan masih menghadapi hambatan serius, baik karena sentralisasi sistem data maupun karena ketergantungan pada kanal informal yang tidak terstandarisasi. Website resmi tidak berfungsi optimal, media sosial bersifat temporer, dan pelaporan data masih terkendala secara struktural maupun teknis. Reformasi diperlukan dengan membangun sistem distribusi informasi yang lebih desentralistik, menyediakan *dashboard* lokal yang terbuka, sekaligus memastikan sinergi KPU dan Kesbangpol dalam manajemen data. Tanpa langkah tersebut, keterbukaan informasi hanya akan menjadi formalitas, bukan instrumen demokrasi substantif.

Peran Kesbangpol dan Transparansi Data Pemilu

Kesbangpol Kabupaten Asahan memainkan peran penting sebagai mediator informasi di tengah keterbatasan kewenangan mereka dalam penyelenggaraan teknis pemilu. Ahmad Nizar, Kepala Kesbangpol Asahan, menegaskan: *"…..kami punya kewajiban untuk menjaga stabilitas, jadi kami bantu menjelaskan ke masyarakat supaya tidak ada prasangka. Kami juga kerjasama dengan KPU untuk sosialisasi, dan kalau ada pertanyaan, kami arahkan langsung ke sumber yang benar"*. Meskipun tidak memiliki kewenangan mempublikasikan data resmi, Kesbangpol memanfaatkan jejaring sosial, organisasi kemasyarakatan, hingga aparatur kecamatan untuk meredam keresahan akibat terbatasnya informasi resmi. Upaya ini diperkuat dengan kegiatan rutin seperti dialog kebangsaan, pembinaan ormas, dan forum diskusi publik, sebagaimana tercatat dalam Laporan Kinerja Kesbangpol 2022. Ahmad Nizar juga menambahkan bahwa *"Kita tetap aktif di lapangan, lewat forum warga, diskusi, atau undangan ke sekolah. Kami ajak warga untuk pahami proses, bukan cuma hasilnya. Karena kadang orang salah paham karena mereka hanya tahu sedikit, dan informasi tidak dijelaskan dengan baik"*.

Dalam perspektif teori kepercayaan Heni et al., (2022), legitimasi publik dibangun ketika institusi mampu menghadirkan respons nyata, keterlibatan jujur, dan ruang dialog terbuka. Fungsi mediasi yang dijalankan Kesbangpol sejalan dengan teori ini, karena kehadirannya di masyarakat berfungsi sebagai penguat kepercayaan meskipun tidak menjadi produsen data pemilu. Penelitian Siswadhi (2020) juga menunjukkan bahwa aktor non-penyelenggara seperti Kesbangpol berperan penting sebagai peredam konflik dan penjernih informasi di saat data resmi sulit diakses. Hal ini memperlihatkan bahwa legitimasi sosial aktor lokal dapat menjadi pelengkap legitimasi hukum lembaga penyelenggara pemilu. Meski demikian, keterbatasan anggaran, kurangnya integrasi sistem informasi dengan KPU, dan absennya mekanisme pelaporan formal dari masyarakat ke Kesbangpol menjadi hambatan struktural yang perlu segera diperbaiki agar fungsi mereka lebih optimal.

Transparansi data pemilu melalui website resmi KPU juga menjadi faktor krusial dalam membentuk kepercayaan publik. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik menyediakan informasi yang mudah diakses secara berkala, termasuk data tahapan pemilu, daftar pemilih tetap (DPT), distribusi logistik, hingga hasil rekapitulasi suara. Informan penelitian menegaskan bahwa publik merasa lebih yakin ketika dapat memverifikasi informasi langsung melalui situs web KPU, karena hal ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi dalam kerangka *good governance*. Akses terbuka mempersempit ruang spekulasi dan mengurangi potensi penyebaran isu negatif.

Bagi Kesbangpol, keterbukaan website resmi memberikan keuntungan tambahan dalam fungsi pengawasan. Data daring memungkinkan mereka memantau distribusi logistik dan partisipasi secara berkesinambungan tanpa selalu menunggu laporan manual dari KPU, sejalan dengan mandat Permendagri Nomor 11 Tahun 2019. Bagi KPU, transparansi website memperkuat asas jujur dan adil

sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun, masalah teknis seperti keterlambatan pembaruan, tampilan yang kurang ramah pengguna, serta rendahnya literasi digital masyarakat pedesaan menyebabkan website kurang efektif. Hal ini membuat KPU Asahan beralih pada media sosial sebagai saluran utama komunikasi publik.

M. Syah, Ketua Divisi Sosialisasi KPU Asahan, menuturkan: *"Peran media sosial sangat signifikan dalam strategi pendidikan pemilih di Asahan. Kami membentuk tim khusus untuk memproduksi konten informatif, menarik, dan relevan, mulai dari reels, story, infografis, hingga live streaming"*. Media sosial terbukti lebih cepat dan interaktif, terutama dalam menjangkau pemilih muda. Namun, dari perspektif kelembagaan, ketergantungan pada saluran informal ini menimbulkan pertanyaan tentang akurasi, arsip formal, dan validitas hukum. Mapilindo, salah satu tokoh masyarakat, menegaskan bahwa *"Informasi itu bukan cuma soal ajakan, tapi juga data. Kalau media sosial hanya untuk promosi, ya masyarakat tetap nggak bisa cek angka-angka penting"*.

Penelitian Milbrath & Goel (1977) menekankan pentingnya akses informasi dalam mendorong kesadaran politik, sementara penelitian Faisal et al., (2024) menyoroti bagaimana ketidaksinkronan regulasi pusat-daerah dapat memperlambat transparansi data pemilu. Dengan demikian, meskipun media sosial efektif sebagai kanal interaktif, website resmi tetap harus diperkuat karena menjadi satu-satunya saluran dengan legitimasi hukum. Tanpa perbaikan pada aspek teknis dan desain, website akan semakin tertinggal dan kepercayaan publik lebih bergantung pada kanal informal yang rawan multitafsir.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan KPU dan Kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas transparansi data di kanal resmi. Reformasi website KPU menjadi kebutuhan strategis agar dapat berjalan paralel dengan media sosial, sehingga informasi tidak hanya cepat dan menarik, tetapi juga legal, valid, dan dapat diarsipkan. Dengan kombinasi ini, partisipasi pemilih berpotensi meningkat signifikan, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dapat lebih terjaga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kesbangpol Kabupaten Asahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu Serentak 2024 telah dijalankan melalui berbagai upaya sosialisasi, baik secara langsung maupun digital. KPU memanfaatkan penyuluhan tatap muka, distribusi pamflet, hingga media sosial, sedangkan Kesbangpol lebih menekankan pendidikan politik melalui sekolah, organisasi pemuda, dan lembaga adat. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena kolaborasi antarlembaga belum berjalan secara sistematis dan terukur.

Transparansi informasi menjadi kendala utama. Website resmi KPU Kabupaten Asahan tidak menampilkan data secara real-time, sering terlambat diperbarui, dan kurang ramah pengguna. Hambatan

teknis juga muncul pada aplikasi Sirekap yang seharusnya berfungsi sebagai pemantau hasil pemilu secara langsung, namun sering gagal diakses atau memunculkan data yang lambat. Keterbatasan sosialisasi membuat banyak masyarakat, terutama pemilih lansia, tidak memahami fungsi aplikasi ini. Sebaliknya, media sosial justru lebih diandalkan warga karena lebih cepat dan mudah diakses, meskipun akurasinya kerap dipertanyakan.

Ketidaktransparanan ini berdampak langsung pada penurunan kepercayaan publik terhadap netralitas penyelenggara pemilu. Sebagian responden menunjukkan sikap skeptis, sementara Kesbangpol berperan menenangkan keresahan dengan pendekatan dialogis. Akan tetapi, efektivitas Kesbangpol sangat bergantung pada akses cepat terhadap data resmi KPU. Terdapat pula kesenjangan komunikasi antar generasi: sosialisasi digital lebih mudah diterima Gen Z, tetapi kurang efektif untuk masyarakat pedesaan dan lansia; sementara pendekatan formal dianggap membosankan oleh pemilih muda.

Hasil penelitian menegaskan bahwa kualitas transparansi data berhubungan erat dengan tingkat partisipasi politik. Wilayah yang memiliki akses daring memadai menunjukkan partisipasi lebih tinggi, sedangkan daerah yang kesulitan mengakses informasi cenderung apatis. Jika permasalahan website resmi, aplikasi Sirekap, dan pola sosialisasi tidak segera diperbaiki, potensi penurunan partisipasi dan kepercayaan publik di pemilu mendatang akan semakin besar. Sebaliknya, perbaikan berupa pembaruan data secara real-time, desain yang inklusif, serta kombinasi strategi komunikasi digital dan tatap muka dapat memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat di berbagai kelompok usia.

DAFTAR PUSTAKA

Antara News. (2019). *503.273 Warga Asahan Ditetapkan Sebagai Pemilih di Pemilu 2019*. https://sumut.antaranews.com/berita/178981/503273-warga-asahan-ditetapkan-sebagai-pemilih-di-pemilu-2019

Bahri, S., Rangkuti, M. R., & Siregar, A. R. M. (2023). Komunikasi Politik di Era Digital Analisis Diskursus pada Marketing Politik Pemilukada Kota Medan Tahun 2020. *KomunikA*, *19*(01), 29–38. https://doi.org/10.32734/komunika.v19i01.9841

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, *21*(1). https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075

Fahruroji, F., & Tuti, R. W. D. (2020). Efektifitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kota Tangerang Selatan. *GEMA PUBLICA*, *5*(1). https://doi.org/10.14710/gp.5.1.2020.1-14

Faisal, N., Alfian, Muzaffarsyah, T., & Yulis, S. (2024). The Case of Candidacy Quota of Regional Legislative Candidates and the General Election Executors in Aceh. *International Journal of Community Care of Humanity (IJCCH)*, *2*(1), 1–11.

Gofur, A., Wahid, A., & Napisah, N. (2023). Penguatan Moderasi Beragama dalam Perspektif Politik di Kabupaten Kotawaringin Timur. *Journal of Moral and Civic Education*, *7*(2). https://doi.org/10.24036/8851412722023779

Halilah, S. (2022). ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA SERTA MEMINIMALISIR GOLPUT. *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, *5*(2), 78–93. http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/470

Heni, L. A., Maskan, M., & Jamiah, J. (2022). Analisis Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *PREDIKSI : Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*, *21*(2). https://doi.org/10.31293/pd.v21i2.6441

Indonesia, K. P. U. R. (2024). *Situs Resmi KPU RI*. https://www.kpu.go.id/

Juliasih, L. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Voter Turn-Out dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pilpres Kabupaten Garut Tahun 2009 dan 2014). *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, *2*(1). https://doi.org/10.36624/jisora.v2i1.24

kumparanNEWS. (2024). *Angka Golput di Pilgub Sumatera Utara Capai 50,68\%*. kumparan.

Ma'mun, A. R. (2023). Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, *3*(1). https://doi.org/10.22225/politicos.3.1.2023.1-16

Malik, I., Khaerah, N., Prianto, A. L., & Hamrun, H. (2020). Edukasi politik virtual era demokrasi digital pada sekolah menengah kejuruan. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, *1*(1), 39–47. https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i2.14

Milbrath, L. W., & Goel, M. L. (1977). Political participation: How and why do people get involved in politics? *(No Title)*.

Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.

Muzaffarsyah, T., Rahman, B., Zulhilmi, Z., Dameria, E., & Mahdi, M. (2021). Pandangan Masyarakat Desa terhadap Dinamika Politik Pasca Pemilihan Gubernur Aceh 2017. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, *7*(1), 29–36. https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i1.60

Putra, A. F. (2020). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, *9*(1). https://doi.org/10.30659/jai.9.1.1-10

Putri, M. P. (2016). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. *Ejournal Ilkom Fisip Unmul*, *4*(1), 30–31.

Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, *17*(33), 81. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374

Santer, S., Zong, Y., Knoll, W., & Rühe, J. (2005). Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work. *Langmuir*, *21*(18), 8250–8254. https://doi.org/10.1021/la051212i

Sarofah, R. (2023). Pengaruh Pendidikan Politik Gen Z Dan Millenial Terhadap Upaya Mewujudkan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang Berintegritas. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, *9*(1). https://doi.org/10.37058/jipp.v9i1.7219

Siswadhi, F. (2020). Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja Dan Kemampuan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kerinci. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, *1*(4), 272–284. https://doi.org/10.36418/jiss.v1i4.48

Sorik, S. (2019). Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*, *16*(1). https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.773

Ummanah, & Pramono, Y. H. (2025). STUDI KUALITATIF TENTANG PERSEPSI MASYARAKAT MUDA TERHADAP ISU POLITIK DI MEDIA SOSIAL PADA PILPRES 2024. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, *8*(April), 1–23.

Utara, K. P. U. P. S. (2024). *KPU Sumatera Utara*. https://sumut.kpu.go.id/

Verba, S., Nie, N. H., & Kim, J.-O. (1978). *Participation and Political Equality: A Seven Nation Comparison*. University of Chicago Press.

Zulkarnain, A. A., Septia, R., Robing, R., & Ansyari, I. (2023). Angka Partisipasi Pemilih Pemula Melalui Peran Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Journal of Governance Innovation*, *5*(1). https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i1.2474